

ANALISIS KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH UNTUK  
PENYELENGGARAAN OTONOMI  
DAERAH PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH (BPKAD)  
KOTA BATU  
*by Oliverdiana Semba*

---

**Submission date:** 21-Jun-2021 12:57AM (UTC-0700)

**Submission ID:** 1386589574

**File name:** Oliverdiana\_Semba\_-\_Oliverdiana\_Semba.docx (26.59K)

**Word count:** 1818

**Character count:** 12388

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH UNTUK  
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA  
BATU  
RINGKASAN**

Kebebasan moneter lokal berperan penting dalam menentukan kapasitas kabupaten untuk mengawal potensi lokal. Alasan penyelidikan ini adalah untuk menentukan derajat kebebasan moneter teritorial dalam pelaksanaan pemerintahan sendiri lokal di Kota Batu. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan strategi grafis subjektif. Informasi yang digunakan adalah informasi opsional seperti laporan moneter yang diperoleh dari Badan Sumber Daya dan Moneter Provinsi (BPKAD) Kota Batu mulai tahun 2015-2019. Teknik penelusuran informasi adalah pemeriksaan proporsi otonomi moneter daerah. Hasil investigasi menunjukkan bahwa kebebasan moneter wilayah Kota Batu diumumkan sangat otonom dalam pelaksanaan swasembada daerah, disebutkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 18,72%, pada tahun 2016 sebanyak 15,84% , tahun 2017 sebanyak 20,04%, tahun 2018 sebanyak 22,26% dan tahun 2019 sebanyak 24,57%. Otonomi moneter lokal ditunjukkan dengan besarnya Pendapatan Unik Teritorial (Cushion) dibandingkan dengan gaji lokal yang dimulai dari berbagai sumber, seperti bantuan pemerintah pusat atau uang muka umum. Kebebasan moneter wilayah Kota Batu menunjukkan bahwa pemerintah terdekat dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan, kemajuan, dan administrasi ke daerah secara mandiri dalam pelaksanaan kemerdekaan wilayah.

***Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah***

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam suatu organisasi pemerintahan, perspektif penting yang harus dilakukan dalam menciptakan swasembada daerah adalah administrasi keuangan daerah. Administrasi moneter teritorial yang besar akan mempengaruhi perputaran keuangan provinsi. Sistem administrasi keuangan lokal yang baik adalah seperti terampil, terbuka, dan penuh perhatian. Setiap organisasi memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat bagi keselarasan fondasi organisasi. Standar administrasi yang baik, khususnya keterusterangan, tanggung jawab, dan insentif uang tunai (kecakapan, kecukupan, dan ekonomi) sebagai instrumen untuk mengakui tanggung jawab publik (mewakili administrasi). Sukses dimaksudkan untuk melakukan tugas yang benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efektif tersirat adalah latihan penciptaan yang menggunakan aset dan sumber aset secara tepat dan tidak perlu (Martono, 2005).

Kemajuan lokal adalah bagian vital yang sangat vital dalam pergantian acara publik. Hal ini karena kemajuan provinsi merupakan salah satu petunjuk atau pendukung diakuinya pergantian peristiwa yang baik kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat melakukan pendekatan pada pemerintah daerah terdekat dimana pemerintah lingkungan diberi posisi yang sangat luas untuk mengontrol keluarganya sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai perubahan atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008<sup>5</sup> bahwa kewenangan publik dilaksanakan berdasarkan standar desentralisasi, pemerintahan bersama dan pemerintah daerah/daerah dibingkai dan diatur sebagai daerah yang mandiri.

Pada awal pelaksanaan pemerintahan sendiri provinsi, khususnya untuk beberapa daerah baru, pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan jabatan publik dan yayasan seperti akses penyampaian variabel penciptaan dan arus kas untuk membantu pelaksanaan kemerdekaan daerah bagi pelaksanaan pergantian keuangan teritorial. Hal ini sesuai dengan kemajuan yang diciptakan oleh Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesobroto (2012) bahwa pada tahap awal perputaran keuangan, tingkat pengeluaran pemerintah untuk spekulasi mutlak sangat besar mengingat pada tahap ini otoritas publik harus memberikan kerangka seperti kesejahteraan, sekolah, kantor transportasi, dan lain-lain.

Penetapan APBD yang diadakan untuk konsumsi provinsi yang sedang dikembangkan akan mendorong kemajuan daerah dengan tujuan agar terciptanya laju pembangunan keuangan secara umum. Latihan-latihan penciptaan di kabupaten akan berkembang dengan baik mengingat kemajuan yang dibiayai oleh pemerintah provinsi dengan tujuan agar usaha masuk ke daerah meningkat dan pada akhirnya laju peningkatan pembangunan moneter wilayah. Pemerintah teritorial dapat mengawasi rekening sebagaimana tercantum dalam rencana Pendapatan dan Penggunaan Lokal. APBD) yang secara langsung atau tersirat mencerminkan kemampuan pemerintah lingkungan untuk mendanai pelaksanaan

tugas pemerintah, perbaikan, dan administrasi sosial daerah. Untuk mengukur batas moneter pemerintah terdekat adalah untuk mengukur penyelidikan proporsi moneter terhadap APBD yang telah diselesaikan dan dilaksanakan (Halim).

Peningkatan ekonomi lokal dapat diperkirakan dengan Gross Territorial Homegrown Item (PDRB) yang merupakan nilai tambah tenaga kerja dan produk yang diciptakan dalam satu periode. Asimilasi rencana belanja daerah akan membangun Produk Domestik Bruto Provinsi (Produk Domestik Bruto) dan menyampaikan pembayaran secara seragam. Pengeluaran publik untuk daerah lebih berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah daripada oleh pemerintah pusat karena pemerintah lingkungan lebih memperhatikan kondisi dan keadaan serta potensi di daerah mereka.

Kemandirian teritorial adalah hak, wewenang, dan komitmen kabupaten mandiri untuk mengarahkan dan menangani sendiri masalah administrasi dan kepentingan jaringan terdekat sesuai pedoman hukum. Swasembada untuk kabupaten memiliki banyak tujuan, salah satunya adalah untuk meningkatkan kesempurnaan kemajuan di daerah dan membuat peningkatan yang mendukung pembangunan yang dicapai dan penyampaian hasil. Satu hal yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memahami keajaiban di atas adalah kemampuan untuk memberikan pembiayaan pembangunan yang bergantung pada sumber yang lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah. Penataan dan pengembangan sangat penting dan dapat diterapkan pada gagasan kemerdekaan wilayah yang baik, murni, dinamis, dan berwawasan luas mengingat pada dasarnya apa yang hendak dirangkai dan ditingkatkan hanyalah kekuatan perbaikan lokal itu sendiri.

Dalam menjalankan pemerintahan sendiri provinsi, penting untuk dapat membangun basis keuangan sendiri, khususnya dengan memperluas Pembayaran Unik Lokal (Cushion), baik dengan memperluas penerimaan sumber Cushion yang ada atau dengan memisahkan sumber Cushion sesuai pengaturan yang ada dan mempertimbangkan kondisi dan potensi penerimaan Pembayaran Unik. Pendapatan Provinsi (Bantuan) dan kenaikan biaya dan non-biaya menimbulkan permintaan untuk membantu pendapatan daerah. Penunjuk yang digunakan untuk mengukur basis moneter kabupaten adalah penanda desentralisasi yang sebenarnya. Desentralisasi sebenarnya adalah proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (Bantuan) untuk menambah pendapatan daerah.

Daerah diberikan pilihan untuk memperoleh berbagai jenis sumber keuangan yang diidentifikasi dengan subsidi dari otoritas publik sesuai dengan urusan pemerintah yang diajukan sehingga posisi dan pilihan menggunakan pungutan provinsi dan membebaskan sehingga semua aset publik mendapatkan hak yang berada di dalam lokal dan perenungan yang berbeda. , pilihan untuk mengembangkan kekayaan lokal dan mendapatkan jenis pendapatan otentik lainnya dan sumber pembiayaan.

Untuk mendapatkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang layak ada lima metodologi yang harus dipikirkan, khususnya: (Rasyid dan Paragon dalam Eko W. Suwardyono, dkk dalam Mulyanto, 2001): (I) Kekuatan Adat Sendiri yang berimplikasi pada kapasitas untuk mengontrol dan melaksanakan pemerintahan sendiri teritorial untuk membantu individu di dekatnya; (ii) Self Changing Force yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pedoman

yang telah ditetapkan secara luas sesuai dengan kondisi lokal, lompatan imajinatif menuju kemajuan dalam bereaksi terhadap potensi provinsi; (iii) Membuat Bantuan Politik Rukun Tetangga yang mengandung arti terselenggaranya pemerintahan lingkungan yang memiliki keaslian yang kokoh dari daerah setempat, baik <sup>1</sup> kepala daerah sebagai kepala daerah maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan yang berwenang; (iv) Mengawasi Aset Moneter, yang berarti memiliki pilihan untuk menumbuhkan kemampuan dalam mengawasi secara ideal jenis pendapatan dan rekening untuk mendukung pelaksanaan, peningkatan, dan administrasi pemerintahan daerah; (v) Menciptakan kompetensi Intelektual berarti membangun diandalkan (SDM) dan terus-menerus tergantung pada kapasitas untuk mengatasi masalah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kabo <sup>1</sup> (1997) dalam Mulyanto (2001) ada 4 (empat) faktor yang pada umumnya akan menentukan tercapainya pelaksanaan OTDA (Kemerdekaan Wilayah) di Indonesia, khususnya: (I) manusia unsur sebagai subyek penggerak (unique component) dalam pelaksanaan pemerintahan daerah provinsi. ; (ii) komponen moneter yang menjadi tulang punggung pelaksanaan latihan pemerintah terdekat; (iii) faktor perangkat keras yang mendukung dinas-dinas pelaksanaan kegiatan RT; (iv) faktor otoritatif dan dewan.

Dalam Abdul Hamid (2004) merek dagang utama yang menunjukkan sebuah kabupaten cocok untuk pemerintahan sendiri terletak pada batas moneter lokal, yang menyiratkan bahwa kemerdekaan harus memiliki kekuatan dan kapasitas yang ideal untuk menyelidiki <sup>13</sup> sumber keuangan itu sendiri, sementara ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat. harus disimpan ke pangkalan. .

Dalam gambaran di atas dapat kita duga bahwa pencapaian swasembada wilayah tidak dapat dipisahkan dari kebebasan suatu daerah dalam bidang moneter. Sudut moneter adalah salah satu standar penting untuk menentukan batas asli distrik dalam berurusan dengan keluarganya sendiri. Batas kabupaten yang dimaksud adalah sejauh mana daerah dapat menyelidiki sumber keuangannya sendiri untuk mendanai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa bergantung pada bantuan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat/pemerintah terdekat.

Tugas informasi moneter teritorial sangat diperlukan dalam membiayai sumber dan jenis dan ukuran penggunaan yang harus diberikan sesuai dengan pengaturan moneter yang dapat diselesaikan secara memadai dan produktif. Informasi moneter lokal memberikan gambaran yang terukur tentang peningkatan dan pengakuan belanja, baik dari sisi pendapatan maupun penggunaan hanya sebagai investigasi rekening provinsi adalah data penting untuk membuat pengaturan dalam melaksanakan administrasi moneter lokal harus melihat tingkat kebebasan lokal.

Pencapaian otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari kapasitas dan kebebasan dalam bidang moneter yang mungkin menjadi penanda utama untuk menghadapi pemerintahan sendiri lokal. Daerah yang memiliki pemerintahan sendiri dituntut untuk mampu dan bebas dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan lingkungan dengan sedikit ketergantungan moneter pada pemerintah pusat.

Motivasi di balik kemerdekaan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah bahwa pemerintahan sendiri daerah dikoordinasikan untuk



mendorong penyebaran kemajuan dan hasil yang merata yang meningkatkan bantuan pemerintah individu, dorongan maju, dan dukungan dinamis di arena publik yang tulus, dinamis, dan dapat diandalkan untuk memperkuat solidaritas dan kepercayaan. negara.

Dalam mendapatkan derajat kebebasan yang layak bagi Kota Batu, seharusnya otoritas publik memiliki opsi untuk menyesuaikan derajat pendapatan terdekat, untuk situasi ini tingkat APBD di Pemerintah Daerah Batu pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 983.713.294.846. Setelah diubah, naik menjadi Rp 992.847.493.756. Sedangkan pada tahun 2020 Pendapatan Unik Teritorial (Cushion) melampaui target, dari Cushion ditetapkan target perubahan sebesar RP 110,9 miliar. Pencapaian tersebut menyentuh angka <sup>3</sup> Rp 123,6 miliar atau 113,91 persen seperti yang ditunjukkan informasi pada pertengahan Desember 2020. Tumpukan rencana keuangan kota Batu difokuskan pada Rp. 207 miliar dari tahun 2020. Akibat pandemi virus corona, terjadi perubahan sehingga anjlok menjadi Rp. 110,9 miliar, maka Aset Keseimbangan yang diproyeksikan adalah Rp 566,9 miliar. Dari tujuan yang mendasari sebesar Rp. 649,5 miliar, disusul Gaji Asli Lainnya yang <sup>3</sup> turun Rp. 136,6 miliar dari target Rp. 143,5 miliar. Kemudian untuk pemanfaatan teritorial ada kenaikan dari Rp. 1 triliun menjadi Rp. 1,1 triliun, yang mencakup konsumsi backhanded <sup>3</sup> sebesar Rp. 623,2 miliar dan konsumsi langsung sebesar Rp. 500,1 miliar. Dari klarifikasi Nurochman, capaian ini dinilai wajar, dengan capaian tahun lalu, APBD 2021 seluruh program SKPD dituntut memiliki outcome yang konstruktif.

Untuk situasi ini, spesialis perlu melanjutkan penyelidikan kebebasan moneter wilayah kota Batu untuk pelaksanaan pemerintahan sendiri lokal, oleh karena itu, ilmuwan tertarik untuk memimpin penelitian dengan judul "Pemeriksaan Kebebasan Moneter Provinsi untuk Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kota Batu"

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran keamanan tersebut, maka maksud dari permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kemandirian pada sebuah keuangan daerah dalam penyelenggaraan pada otonomi daerah di Kota Batu ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari definisi masalah di atas, sehingga tujuan dari riset ini ialah untuk dapat melihat tingkat kemandirian pada sebuah keuangan daerah dalam penyelenggaraan pada otonomi daerah di Kota Batu

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Peneliti**

Dapat menambah pengertian dan informasi seperti untuk melaksanakan informasi yang terhadap tingkat kemandirian pada sebuah keuangan daerah dalam penyelenggaraan pada otonomi daerah di Kota Batu.

## 2. Bagi Instansi

1. Hal ini cenderung digunakan sebagai bahan informasi dan penilaian terhadap tingkat kemandirian pada sebuah keuangan daerah dalam penyelenggaraan pada otonomi.
2. Untuk Perguruan Tinggi Tribhuwana Tungadewi Malang, dapat dijadikan referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan tingkat kemandirian pada sebuah keuangan daerah dalam penyelenggaraan pada otonomi daerah di Kota Batu.

# ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BATU

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://journal.feb.unmul.ac.id">journal.feb.unmul.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://malangvoice.com">malangvoice.com</a> Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	2%
5	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
7	Ahmad Riyadh U. Balahmar. "167 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1%

# KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016

Publication

---

8	<a href="#">adoc.pub</a> Internet Source	1 %
9	<a href="#">123dok.com</a> Internet Source	1 %
10	<a href="#">administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="#">www.scribd.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="#">www.slideshare.net</a> Internet Source	1 %
13	<a href="#">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="#">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="#">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="#">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BATU

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---